



UDARASA

Akal Sehat

OLEH BRE REDANA

Anak-anak terutama dari kalangan berkecukupan yang sehari-hari berbahasa Inggris tidaklah perlu dioposisikan dengan nasib bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun ekspresi jati diri bangsa. Biarlah anak-anak manis itu berbahasa Inggris entah dengan *grammar* yang rapi atau berlepotan, dan membuat bangga orangtua yang tak paham kaidah bahasa. Yang perlu lebih dikhawatirkan, baik pada anak-anak maupun orangtua bahkan, adalah hilangnya *common sense* atau kita sebut secara sederhana: akal sehat.

Soal bahasa yang terucap, kalau Anda kenal para ahli semiologi, tidaklah seberapa dibanding aspek komunikasi secara keseluruhan. Bahasa Jawanya: *ora sepiroo*. Roland Barthes, yang tulisannya berjudul *The Death of the Author* banyak dikutip orang yang ingin kelihatan pintar, pasti juga akan mengatakan kecilnya persentase linguistik. Dalam keseluruhan komunikasi manusia tersertakan hal-hal lain, seperti simbol, kode, tanda, citra, bahasa tubuh, suara musik, obyek, dan lain-lain berikut asosiasi yang kompleks dari itu semua. Seribu kali ucapan *I love you* dari cewek di Plasa Senayan, barangkali tidak semenyentuh dibanding kata yang terucap sekali seumur hidup dari seorang wanita kepada pasangannya, dalam bahasa Jawa pula: *tresno*. Bayangkanlah, ruang dan waktu terpadatkan di situ. Dunia berhenti bergerak.

Hanya dengan kekayaan referensi, kemampuan imajinasi, tak ketinggalan kepekaan terhadap jalannya alam Anda bisa memahami tanda-tanda yang subtil semacam itu, yang terdapat pada semua suku bangsa. Satu bahasa asing, yang paling dominan di planet ini sekalipun, tak akan mampu menjadi pemborong tunggal dari kekayaan simbol dan makna yang dimiliki oleh setiap bahasa.

Oleh karenanya, tak berlebihan kalau ada yang melihat, krida bahasa ada kaitannya dengan totalitas krida manusia, menyangkut pikiran, tubuh, daya—*mind, body, spirit*. Kalau pikiran kusut, bahasa akan kusut. Di profesi yang berhubungan dengan teks dan bahasa, tak kurang banyaknya yang pikirannya kusut. Kalimatnya membingungkan dan bikin geregetan.

Dunia digital memberi andil, bagaimana ilusi menggantikan imajinasi, mimpi menggantikan akal sehat. Di televisi, orangtua mendorong anak-anaknya untuk jadi penyanyi, penari, pelawak, dan lain-lain pelaku dunia hiburan. Realitas gadungan dunia digital telah membuat ilusi melampaui kenyataan sehari-hari, melampaui kesadaran bahwa sejatinya ada yang tak bisa di-tinggalkan dari penjadian seseorang, yakni proses.

Seiring pemajuan terhadap percepatan (*quickness*), proses makin tersingkirkan. Kalau bisa kaya dengan segera, mengapa harus bekerja dengan susah payah. Para motivator paling ahli mengkhotbahkan bagaimana menjadi kaya dalam waktu cepat, sukses secara mendadak, problem hidup bisa luntur seketika dengan mantra *power point*.

Terpisahny pikiran dari kenyataan obyektif berarti juga terganggunya keselarasan antara otak dan tubuh. Orang tergopoh-gopoh. Pada hari pertama masuk sekolah beberapa waktu lalu, di sejumlah tempat orangtua berebutan bangku untuk anak-anaknya. Mereka menduduki bangku di kelas terlebih dahulu, seperti para calo di gerbong kereta api zaman dulu. Itulah pelajaran budi pekerti pertama untuk anak-anak: saling se-robot.

Sebegitu miskinkah kita sehingga kalau tidak berebutan bakal tak mendapat bagian? Kemiskinan telah bertransformasi menjadi budaya miskin. Dalam hal ini subyeknya tak selalu harus mereka yang hidupnya berkekurangan. Dia bisa menghinggap siapa saja, termasuk orang-orang kaya yang menderita *post scarcity syndrome*—sindroma berkekurangan. Kondisi budaya miskin atau disebut antropolog *the culture of poverty* inilah yang mengorup akal sehat.

Anda kaya, anak-anak Anda mau berbahasa Inggris dan kagok berbahasa Indonesia, silakan. Bahkan mau berbahasa dari planet lain, *monggo*. Bagi saya, yang menyembalkan adalah kalau berhadapan dengan orang yang tak punya akal sehat.

SURAT KEPADA REDAKSI



Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di *Kompas*. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@kompas.co.id atau ke Redaksi *Kompas* Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau *scan* identitas diri.

Sulitnya Cari Modal Usaha

Ketika pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, saya termasuk pihak yang antusias menyambutnya. Namun, apa daya, komitmen tersebut belum dapat dirasakan masyarakat, setidaknya saya.

Saya mengalami sendiri betapa susah mencari modal untuk membuka usaha. Waktu itu saya ingin membuka restoran. Saya mencoba menawarkan proposal ke bank pemerintah dan bank perkreditan rakyat. Kebanyakan bank memberi syarat bahwa usaha harus sudah berjalan selama dua tahun dan harus memberi agunan berupa *fixed asset*. Kemudian saya coba mengajukan proposal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ke beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Saya menghubungi via telepon sebelum mengirimkan proposal. Dari beberapa BUMN yang saya hubungi, kebanyakan sudah tidak menyalurkan dana PKBL, ada yang disebabkan banyaknya kredit macet. Ada juga yang telah menerima proposal dan melakukan survei, tetapi belum dapat memberi bantuan disebabkan kebijakan perusahaan.

Setelah mengalami sendiri betapa susah mencari modal usaha, saya jadi tahu mengapa persentase jumlah pengusaha Indonesia sangat sedikit, tidak sampai 1 persen dibandingkan dengan Singapura (8 persen), Tiongkok, dan Jepang (11 persen), bahkan negara di Asia Tenggara berkisar 3-5 persen. Padahal, menurut teori ekonomi yang berkembang, suatu negara berpotensi menjadi negara maju jika mempunyai wirausaha minimal 2 persen. Ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri UKM. Usaha pemerintah menstimulasi industri kecil menengah cuma retorika belaka, pun masih memimpikan mempunyai produk kebanggaan nasional.

AGUNG BUDI ARNANTO
Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum:	Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum:	Lilik Oetama, Rikard Bagun
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:	Budiman Tanurejdo
Wakil Pemimpin Redaksi:	Trias Kuncahyono, Niniuk Mardiana Pambudy, James Luhulima
Redaktur Senior:	St. Sularto
Redaktur Pelaksana:	Mohammad Bakir
Wakil Redaktur Pelaksana:	Rusdi Amral, Try Harjono,
	: P. Tri Agung Kristanto, Sutta Dharmasaputra
Sekretaris Redaksi:	Subur Tjahjono, Mohammad Nasir

ARIEL HERYANTO

IDENTITAS
”ASLI”
ADALAH
FIKSI



FOTO-FOTO: KOMPAS/RIZA FATHONI

Indonesia telah diberkahi, tak hanya oleh kekayaan kemasyarakatan dan kebudayaan, tetapi juga oleh sejarah panjang perkembangan gagasan yang cemerlang.

OLEH MARIA HARTININGSIH

Berbagai gagasan ini merupakan hasil persaingan sekaligus percampuran berbagai pandangan dari orang-orang berwawasan kosmopolitan yang berupaya menjelajahi bentuk lokal modernitas *hybrid*.

”Sayangnya sejak pertengahan abad lampau, kekayaan budaya ini banyak yang telah dihapus dari sejarah resmi ingatan bersama,” ujar Prof Ariel Heryanto (61), peneliti, pengajar pada Jurusan Budaya, Sejarah dan Bahasa, College Asia-Pasifik, The Australian University, di Canberra, Australia.

Itulah pesan utama bukunya, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (KPG, 2015), hasil terjemahan kritikus film Eric Sasono dari buku *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesia Screen Culture* (NUS Press, 2014).

Ariel ditemui seusai peluncuran bukunya di Jakarta, awal Juli 2015.

Merongrong ideologi

Menurut Ariel, warisan budaya itu telah menjadi sasaran serangan kelompok modernis yang bersaing dan berupaya memaksakan batasan sempit tentang makna menjadi Indonesia. Untungnya, serangan terhadap kekayaan sejarah dan keragaman Indonesia tidak pernah sepenuhnya berhasil.

Apa yang ingin ditunjukkan buku itu?

Betapa kaya dan hebat Indonesia karena kemajemukannya. Masalah serius terjadi, ketika ada sebagian aliran modernis tak hanya memuliakan kemurnian-keaslian, tetapi juga merendahkan, memusuhi, dan menyerang yang dianggap kurang, tidak asli atau murni. Secara garis besar, modernisme punya kecenderungan tidak toleran pada yang *hybrid*. Sikap intoleran ini ditunjukkan oleh sebagian aliran agama dan ideologi yang modernis.

Bagaimana dengan kekuatan dominan yang menindas atas nama apa pun?

Semata-mata menjadi *hybrid* dan menyadari hal itu tak akan mampu menghapuskan ketimpangan sosial, tetapi hibriditas punya daya tarik dalam masyarakat modern terakhir karena berbakat menjadi alat perlawanan.

Banyak penindasan besar-besaran didasarkan pada suatu fiksi tentang identitas yang otentik, asli, atau murni. Dalam masyarakat kolonial Belanda, ada fiksi tentang ke-Eropa-an yang dianggap sama dengan peradaban tinggi dan modernitas. Fiksi ini dijadikan dasar membenarkan diskriminasi sosial dan berbagai kekerasan politik, berdasarkan siapa yang lebih atau paling ”nasionalis”. Tahap selanjutnya, dipersempit menjadi etno-nasionalisme, yakni ke-pribumi-an yang dianggap paling atau lebih nasionalis sejati atau murni. Di zaman Orde Baru, diskriminasi itu masih ditambah politik superioritas maskulin, premanisme dan militerisme.

Dalam berbagai masyarakat, yang digunakan sebagai pembenar ketimpangan sosial dan penindasan adalah kemurnian dan keabsahan beragama, beda jenis kelamin dan orientasi seksual, bahasa, warna kulit, kebangsawanan, pendidikan, modal material, dan seterusnya. Kesadaran akan hibriditas membantu me-

PROF ARIEL HERYANTO

- ♦ **Pekerjaan:** Pengajar dan peneliti pada Jurusan Budaya, Sejarah dan Bahasa, College Asia-Pasifik, The Australian University (ANU) di Canberra, Australia, sejak tahun 2009, University of Melbourne (2000-2008), The National University of Singapore (1996-1999).
- ♦ **Pendidikan:** PhD Antropologi Budaya, Monash University (1994), MA Kajian Asia, University of Michigan, AS (1984), Sarjana Pendidikan UKSW (1980).
- ♦ **Cakupan penelitian dan mengajar:** kajian budaya, budaya pop, media massa, politik identitas, kelas menengah perkotaan, analisis wacana, kekerasan politik.
- ♦ **Karya:** sembilan buku, di antaranya, *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics* (2008), *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* (2006), 600-an artikel di media dan majalah di Indonesia, Hongkong, dan Thailand, bab-bab dalam 45 buku, 29 tulisan di jurnal di Indonesia dan luar negeri, pembicara dan pembicara utama dalam 47 konferensi internasional sejak tahun 1997.

rongrong omong kosong tentang identitas otentik.

Identitas banyak dibahas, tetapi kenikmatan dianggap ”non-issue”...

Tak semua orang berpolitik itu selalu bersikap serius. Sebaliknya, yang tampak main-main bisa punya kekuatan politis yang hebat. Antara politik mati-matian, fanatik, idealisme, ideologi, identitas, maupun yang main-main, yang nikmat-nikmat, sering kali tak terpisah. Mereka tercampur. Campurannya tak satu ragam.

Kenikmatan tak pernah alami. Ia harus dipelajari. Misalnya kenikmatan yang dipromosikan dalam film-film yang saya teliti. Di situ cari jodoh, sekolah tinggi di luar negeri dianggap penting, tanpa peduli pada masalah sosial yang lebih makro. Kok film seperti itu bisa laris dan terus diproduksi di masa ini dan tidak di masa lalu?

Mengapa?

Kembali lagi, maaf, ke tahun 1960-an. *Apa kaitan Tragedi 1965 dengan identitas?*

Pembunuhan tahun 1965-1966 merupakan dasar paling menentukan dari seluruh identitas dan definisi apa pun tentang Indonesia, sampai sekarang. Dia bukan satu-satunya penyebab, tetapi induk dari berbagai penyebab lain, yang menjelaskan macam-macam, termasuk keuangan kita, tata-sosial kita, akademi kita, agama kita, moralitas kita, penjara kita.

Merumus ulang

Pertanyaan paling penting—dari buku yang ditulis berdasarkan kegiatan penelitian antara tahun 2009 dan 2012—adalah bagaimana orang Indonesia mencoba merumus ulang identitasnya sesudah Orde Baru.

Identitas dan Kenikmatan meneropong sejumlah isu mutakhir dalam masyarakat, mulai dari islamisasi, budaya kaum muda perkotaan hingga K-Pop, politik jalan, representasi pembunuhan 1965-1966, minoritas Tionghoa, dan menunjukkan kebertautan antar berbagai isu tersebut.

Semua itu, menurut pakar Kajian Budaya Universitas Gajah Mada, Dr Budiawan, dalam *endorsement* pada buku itu, bermuara pada problematisasi narasi-narasi besar, seperti *nasion* dan nasionalisme, globalisme dan globalisasi, modernisme dan modernitas, yang selama ini diterima begitu saja.

”Selama ini yang lebih banyak diteliti adalah kaum elite, atau sebaliknya, korban tragedi dan mereka yang dipinggirkan. Orang-orang biasa, hal-hal biasa, jarang diperhatikan peneliti, atau mereka tak tahu bagaimana meneliti orang-orang biasa ini.”

Bisa dijelaskan lebih jauh?

Di Indonesia, pernah ada upaya terlembaga, berlingkup nasional, dilakukan

oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan kiri) yang mencoba merumuskan teori dan praktik progresif dalam kaitan antara politik dan budaya.

Sejak 1965, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang siap menjelaskan secara konseptual bagaimana persisnya kebudayaan berkait dan berkelindan dengan politik. Teori-teori kebudayaan terpisah dari politik. Teori-teori politik terpisah dari kebudayaan. Sementara di masyarakat terjadi gejala luar biasa di bidang politik kebudayaan dan budaya yang politis. Ada fenomena Rendra, Iwan Fals, kemudian Inul Kajian Budaya atau *Cultural Studies* mengisi kekosongan ini.

Kajian Budaya meneliti hal-hal sepele, sehari-hari, orang biasa, berbeda dengan teori-teori besar seperti sosialisme yang dulu dikerjakan Lekra dan meromantisasi rakyat yang paling tertindas. Kajian Budaya mencoba menata teori dan konsep yang rumit antara kekuasaan dan kebudayaan di kalangan kaum bersahaja dalam kehidupan sehari-hari, bukan kaum elite dan bukan proletariat yang paling menderita.

Di Barat yang dilawan jelas, misalnya kapitalisme dan neo-liberalisme. Di Indonesia?

Yang pertama dan utama waktu itu adalah otoritarianisme dan militerisme, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, di jalan, di dapur, ruang tamu. Juga

patriarki, primordialisme, yang ditanggapi secara gagap oleh ilmu-ilmu yang ada.

Kajian Budaya punya potensi, tetapi tak punya kekuatan mengubah masyarakat karena masih sangat kecil. Namun, Kajian Budaya punya jurus-jurus, ilmu-ilmu, main-main, kelak, kenikmatan, enggak serius, yang minimal, bisa mengusik atau menjengkelkan *status-quo*.

Mengapa tidak pernah kuat di Indonesia?

Pertama, lembaga formal di negeri ini begitu lemah. Yang kuat adalah birokratisasi, administrasi, dan formalitas dalam lembaga akademik. Mereka yang cerdas, berbakat, dan tekun dalam dunia ilmu pengetahuan tidak menemukan tempat memadai. Kedua, sebenarnya secara kebudayaan dan politik kita belum banyak beranjak dari Orde Baru.

Anda tertarik pada sejarah Indonesia 1920-1940 dalam penelitian yang sedang Anda kerjakan. Ada kaitan dengan identitas?

Indonesia, kalau mau maju, harus sekali melihat ke belakang. Ada beberapa kunci persoalan yang tersembunyi atau tercecer di situ. Secara global juga sangat menarik karena sebagian besar pemikiran besar di bidang musik, akademi-teori, perubahan tata kota terjadi pada awal abad ke-20 itu. Saya meneliti dua kelompok sosial dalam kurun itu: Indo-Eropa dan peranakan Chinese.

LINTASAN

Kepak yang Kuat

Ariel Heryanto tumbuh dengan beban indoktrinasi Orde Baru yang melatihnya berpikir sebagai orang asing di Tanah Air sendiri, yakni ”nonpribumi” yang kesasar ke Indonesia karena keceklakan sejarah.

Namun, politik yang menindas itu dijangkir balik menjadi modal pemberdayaan yang luar biasa. Ariel tak mau dan tak mampu menjadi ”Jawa” asli meski lahir di Jawa, juga tak mampu dan tak berminat menjadi ”Tionghoa” tulen meski berlatar belakang Tionghoa. Dia nyaman memeluk erat ke-non-pribumi-annya secara maksimal.

”Saya menggali kesadaran dan menikmati posisi sebagai minoritas di mana pun di dunia,” ujarnya.

”Tak hanya dari segi etnisitas, tetapi juga agama, bahasa, dan kebudayaan. Tak hanya di Indonesia atau Malaysia, tetapi juga di semua negara dengan mayoritas etnis China, apalagi di negara-negara sekuler dan non-Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Saya merasa nyaman di semua tempat itu sebagai non-pribumi.”

Belakangan dia menyadari bahwa semua manusia di dunia modern ini pada dasarnya nonpribumi, indo, blasteran, peranakan, alias *hybrid*. Sebagian besar tidak menyadari, sebagian lainnya menyenali atau mengingkarinya.

Jalan panjang



Ariel kecil ingin jadi pelukis, lalu arsitek. Dia mendaftar dan diterima di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, tetapi sebagai ”nonpri” dituntut membayar uang masuk beberapa kali lipat, di luar kemampuan keluarganya. Dia lalu mendaftar IKIP Malang Jurusan Bahasa Inggris, tetapi juga ditolak, konon karena etnisitas dan jenis kelaminnya.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga adalah pilihan akhir. Tak diduga, di situ dia merasa dihujani berkah. ”Termasuk mendapatkan istri bekas teman sekuliah ha-ha-ha,” kenang ayah dua anak itu.

Selama 16 tahun dia mengajar di UKSW, sebelum terlibat dalam konflik internal 1993-1995 bersama 150 dosen, ratusan mahasiswa, dan karyawan dari kelompok pro-demokrasi. Sembilan bulan tak menerima gaji, terlunta-lunta tanpa pekerjaan. Peristiwa itu menjadi seperti titik balik, yang membukakan pintu untuk menjelajah ketakterhinggaan langit ilmu pengetahuan.

Ariel Heryanto yang meninggalkan dunia pendidikan di Indonesia sejak tahun 1996 adalah satu dari sedikit ilmuwan yang konsisten dengan kajian-kajian kritis dan menghasilkan karya-karya penting untuk memahami masyarakat dengan berbagai fenomena yang sedang berlangsung.

Jadwalknya padat, mengajar dan melakukan penelitian, dikerjakan sendiri, tim, ataupun bersama ilmuwan lintas negara dan benua, serta seminar-seminar penelitian. Sejak tahun 1998 ia terlibat penuh dalam serangkaian prakarsa transnasional untuk mengembangkan kajian-kajian berbasis kawasan Asia Tenggara.

Meski 19 tahun mengembara, Indonesia, juga sahabat dan kerabat adalah bagian dari darah dan dagingnya, sekaligus masa lampau yang membentuk dirinya. Banyak kenangan sentimental tersimpan di Malang, kota kelahirannya.

Sebagai pengagum berat *Bhagawad Gita*, ia berusaha tidak terikat pada sebuah masa tempat, benda, orang, lembaga, dan gagasan apa pun. ”Saya kerasan di semua tempat, tetapi perasan kerasan itu tak pernah permanen,” ujarnya. (MH)